

Kehidupan Multi Etnik di Kota Padang

Iim Imadudin

Abstrak

"Yang unik adalah kehadiran Irwan Prayitno, calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera. Namanya yang "kejawa-jawaan" membuat putra Minang kelahiran Yogyakarta pada 20 Desember 1963 ini kerap dianggap bukan orang Minang. Karena itu, seminggu sebelum dinyatakan sebagai calon (Gubernur Sumatera Barat), ia membuat acara adat dan dinobatkan sebagai datuk (gelar ninik mamak) oleh sukunya di Kuranji, Padang."

Pendahuluan

Peristiwa *batagak panghulu* (penobatan gelar datuk) pada tanggal 27 Maret 2005 itu dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR yang juga Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, dan beberapa pejabat lokal. Dari undangan yang hadir saja dapat tergambar bahwa peristiwa itu cukup penting: *pertautan kuasa dan budaya*. Yang menarik untuk diungkap tentu bukan relasi kuasa-budaya, melainkan fenomena stereotip etnik yang kental. Apa yang dilakukan Irwan Prayitno merupakan cara untuk menghilangkan resistensi *urang awak*. Padahal Irwan adalah intelektual muslim, aktivis partai, pendakwah yang cukup dikenal, anggota DPR RI, pengusaha, dan pendiri sebuah lembaga pendidikan Islam yang cukup diminati.

Sekarang gelarnya adalah Irwan Prayitno *Datuk Rajo Bandaro Basa*. Pencantuman gelar datuk di belakang namanya dianggap mempermudah penerimaan masyarakat ranah Minang. Untuk lebih menguatkan dukungan terhadap Irwan, pada pendukungnya membangun opini publik lewat publikasi di Koran-koran lokal. Tidak lupa sebuah buku yang berjudul "Irwan Prayitno Dt. Rajo Bandaro Baso: Kiprah Seorang Asli Putra Minang" diterbitkan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Pada bagian pengantar disebutkan bahwa buku tersebut diterbitkan untuk menepis dugaan masyarakat yang menyatakan Irwan adalah orang Jawa.



Dalam perspektif hegemonik Gramscian, Irwan Prayitno yang jika dilihat dari namanya seperti orang Jawa (dan seandainya jika benar-benar orang Jawa), tentu tidak dapat menjadi pemimpin formal dari sebuah administrasi pemerintahan yang berlatar belakang budaya yang dominan. Ia memerlukan dukungan yang besar dari orang Minang yang menjadi *host population* (tuan rumah). Resistensi budaya juga dialami Harun Zain saat hendak menjabat Gubernur Sumatera Barat di tahun 1966. Harun yang besar dan datang dari "rantau" (Jakarta) dapat dikatakan tidak menguasai adat-istiadat dan tidak bisa berbahasa Minang. Oleh karena itu, Ia sering mendapat *cemeeh* (cemoohan) orang-orang, "*Iko pulo bantuak urang nan mampaeloki nasib kito?* (Ini orangnya yang akan memperbaiki nasib kita?). Dalam sejarah pemerintahan Sumatera Barat, Gubernur Harun Zain tercatat berhasil memulihkan kondisi Sumatera Barat setelah mengalami kehancuran akibat PRRI. Sekarang, sejauh mana strategi Irwan untuk menghilangkan resistensi itu efektif, waktulah yang akan menjawabnya.

Pada prinsipnya telah sama-sama diketahui bahwa inti dari nilai-nilai multikulturalisme terletak pada saling mengakui eksistensi kebudayaan yang berbeda, saling memahami dan menghargai. Tercakup dalam pengertian keanekaragaman kebudayaan adalah keberadaan dan kesejajaran kebudayaan dari mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas. Multikulturalisme mewedahi perbedaan-perbedaan. Secara konseptual, multikulturalisme adalah *modus vivendi* masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan. Namun pada praktiknya, multikulturalisme masih harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam persentuhannya dengan sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Mewacanakan multikulturalisme dalam konteks keminangkabauan menjadi menarik, karena citra demokratis dan egaliter yang melekat pada etnis itu. Citra yang demikian akan segera mendapat penegasan jika berderet-deret tokoh bangsa asal Minang menjadi acuannya. Tokoh-tokoh bangsa, seperti Hatta, Natsir, Sjahrir, dan Tan Malaka yang sama-sama lahir dari ranah Minang, namun memiliki perbedaan ideologi perjuangan yang amat tajam: Nasionalis, Islam, Sosialis, dan Komunis. Pada tingkat akar rumput, kehidupan bernagari dianggap merupakan salah satu referensi bentuk demokrasi komunitarian yang sarat dengan musyawarah mufakat. Belum lagi semangat perantauan yang dinamis dari *urang awak*. Orang Minang menjadi warga di berbagai tempat, karena kemampuan adaptasinya. "Dimana langit dijunjung, di situ bumi dipijak". Mereka menarik banyak pengalaman hidup di rantau yang multi etnik dan



multikultur. Misi budaya menjadi "*urang nan sabana urang*" menimbulkan semangat kompetisi yang kuat dalam dunia perniagaan.

Sekarang bagaimana persisnya kehidupan multi etnik di ranah Minang sendiri? Bagaimana halnya dengan kehidupan multi etnik di kota Padang di era otonomi daerah sekarang ini? Tulisan ini selain bermaksud menjawab pertanyaan tersebut juga ingin menguji tesis pertama Colombijn (1994: 357) tentang hubungan antar etnis di kota Padang: "*The overall tendency is a shift from a moderately expressed pluriformity to a strongly expressed uniformity*" (Kecenderungan umum yang terjadi adalah pergeseran dari kemajemukan yang diungkapkan secara moderat menuju keseragaman yang diungkapkan secara tegas). Dengan keterbatasan data yang dimiliki, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai hasil penelitian yang mendalam, melainkan studi pendahuluan yang didasarkan pada pengamatan lapangan dan telaah pustaka. Lebih tegasnya lagi, pengalaman dan pemahaman dari lapangan.

Kota Padang: Multi Etnik dalam Sejarah

Studi Amran (1988), Safwan (1987), dan Colombijn (1994) memberikan fakta yang tak terbantahkan bahwa kota Padang memiliki akar kehidupan multi etnik yang panjang. Di samping orang Minang yang lebih dahulu menetap, orang Nias, Jawa, dan Cina telah lama tinggal di Padang bersamaan dengan kolonialisme Belanda di daerah ini. Mereka datang untuk dipekerjakan sebagai buruh dan tenaga kasar. Orang Nias datang ke Padang pada abad ke-19 dan merupakan suku minoritas terbesar. Orang Jawa yang tiba ke Padang merupakan prajurit Sentot Alibasya yang didatangkan untuk memerangi kaum Padri. Orang Mandailing yang sampai di Padang adalah para prajurit hulubang Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai. Kemudian, masing-masing mereka membentuk perkampungan: kampung Nias, kampung Jawa, dan kampung Cina (Pondok). Kedatangan mereka memberikan corak perkotaan terhadap daerah yang baru dibuka ini.

Mula-mula yang pertama menempati negeri Padang adalah Nan Suku VIII yang meliputi Seberang Padang, Alang Lawas, dan Ganting. Orang-orang Minang yang datang kemudian berasal dari daerah *darek* (pedalaman). Dalam perspektif orang Minang, keluar dari nagari mereka merupakan bagian dari perantauan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan ketika orang Bukittinggi, Payakumbuh, dan Batusangkar, misalnya sedikit saja merasakan keterikatan sosio-kultural dengan kota Padang. Menurut Nursyirwan Effendi (1993:5) banyak



penduduk kota Padang yang mengacukan diri sebagai pendatang dari luar kota Padang, karena tingginya frekuensi migrasi internal yang mereka lakukan. Kedatangan para perantau itu umumnya untuk bekerja dan menuntut ilmu. Dengan motivasi tersebut, mereka hanya merasa sedikit bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Perwujudan dari pernyataan demikian dapat dilihat dari terbatasnya disiplin sosial yang ditunjukkan dengan sampah berserakan di sudut-sudut kota, perilaku berlalu lintas yang kacau, dan sebagainya. Kondisi ini yang membuat walikota Padang, Hasan Basri Durin, pada tahun 1974 mempopulerkan slogan "Padang Kota Tercinta". Pada masa walikota berikutnya, Syahrul Ujud, usaha tersebut diwujudkan melalui kebijakan K-3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Kebijakan pemerintah kota dalam menata lingkungan sosialnya menuai penghargaan tertib sosial dari pemerintah berupa Penghargaan Adipura. Terakhir piala Adipura sebagai kota terbersih nomor dua di Indonesia diterima Walikota Fauzi Bahar dari Presiden SBY pada bulan Juni 2005. Fauzi juga melanjutkan tradisi walikota sebelumnya dengan menggalakkan slogan Padang "Kota Tercinta Yang Kujaga dan Kubela".

Karena alasan-alasan teoritis dan hak historis tentu tidak tepat mengatakan bahwa hubungan kelompok etnis Minang dengan kelompok etnis Jawa, Cina, dan Nias sebagai orang asal dan pendatang. Proposisi yang tepat untuk menggambarkannya adalah hubungan antara *dominant-group* (kelompok mayoritas) dengan *subordinate group* (kelompok minoritas).

Stereotip, Identitas, dan Otonomi

Otonomi daerah memang memberikan ruang untuk menggali potensi dan kearifan lokal seluas-luasnya. Kekuatan lokal yang dahulu dinamis sempat mengalami penghancuran dan irrelevansi akibat politik monokultur Orde Baru. Daerah-daerah yang berada dalam domain pengaruh kebudayaan Jawa segera menegaskan identitas. Perspektif yang lebih memandang ke dalam, pada gilirannya menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Perbedaan kebudayaan atau hubungan budaya kemudian bergeser menjadi hubungan antar jati diri. Stereotip dan prasangka mempertegas perbedaan dan batas-batas. Dalam kondisi seperti itu muncul isu-isu mayoritas-minoritas atau pribumi-pendatang yang memicu munculnya konflik. Konflik sosial yang terbuka atau sembunyi-sembunyi, karena prasangka-prasangka yang lebih banyak dapat dirasakan, tetapi tidak dapat diungkapkan.



Bruner (dalam Colombijn, 1994: 147) membedakan tiga aspek dominasi suku, yakni proporsinya dalam populasi keseluruhan, budaya lokal yang sudah mapan, dan letak kekuasaan. Berkenaan dengan itu, Royce (dalam Pelly 1989: 1) menyebutkan ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok etnis dalam suatu masyarakat majemuk, yakni: kekuasaan (*power*), persepsi (*perception*), dan tujuan (*purpose*).

Pada tahun 1930 orang-orang pendatang berjumlah 47% dari keseluruhan penduduk kota Padang. Empat puluh tahun kemudian (1970) prosentase tersebut mengecil menjadi 43%. Menurut data yang penulis olah dari *Sensus Penduduk tahun 2000*, jumlah keseluruhan penduduk kota Padang adalah 712.449 jiwa. Penggolongan etnik penduduk kota Padang menurut jumlahnya, yaitu Minang 642.328 jiwa; Jawa 23.271 jiwa; Cina 13.538 jiwa; Batak 8896 jiwa; Melayu 6838 jiwa; Nias 5782 jiwa; Sunda 2561 jiwa; Mandailing 1535; dan sisanya 7700 jiwa. Dari data tersebut dapatlah diketahui bahwa kelompok etnik di luar Minang merupakan minoritas (10%) dari proporsi keseluruhan warga kota Padang. Etnis Minang merupakan *dominant-group* terhadap etnis-etnis lain yang ada di kota Padang.

Dalam kehidupan intern, kelompok etnis-etnis minoritas tersebut tentu saja akan mempertahankan kesetiaan primordial dari etnis mana mereka berasal. Kelestarian adat-istiadat itu akan tampak pada pemakaian bahasa daerah dan adat kebiasaan lainnya. Tidak ada data yang sahih seberapa banyak dari warga kelompok etnik non-Minang yang mengikatkan diri mereka pada perkumpulan satu kelompok etnis. Namun, sejauh yang diketahui beberapa perkumpulan kelompok etnis, antara lain *Pandawa* (Perkumpulan Jawa), *Paguyuban Warga Sunda*, *Parados* (Batak Dolok Sanggul Tapanuli Utara), *Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Padang* (IKMNP), *Parsadaan Satahil Sauduran* (Mandailing), *Semayang* (Mandailing), dan *Himpunan Bersaudara Teguh* (Cina) masih intensif melakukan kegiatannya. Menurut keterangan informan, orang Batak yang tidak mengikuti kegiatan perkumpulan, setidaknya sebagai anggota, akan mengalami ketersingkirkan sosial. Ikatan-ikatan yang berorientasi ke dalam, mungkin menjadi salah satu sebab mengapa orientasi keluar mereka tidak cukup kuat. Lagi pula salah satu stereotip yang berkembang bahwa orang Batak beragama Kristen. Ini yang menyulitkan terjadinya hubungan sosial yang lancar. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa orang Batak yang muslim kurang peduli dengan perkumpulan. Orang Batak muslim telah berasimilasi dengan penduduk etnis Minang karena persamaan agama.



Dalam proses akulturasi kelompok minoritas selalu berorientasi kepada budaya yang dominan. Ekspresi dari hal itu dapat dilihat pada pemakaian bahasa, nama, makanan, dan perilaku dalam pergaulan. Proses akulturasi yang paling jelas terlihat pada kebiasaan makan. Kebiasaan makan masakan Minang etnis minoritas membuat lidah yang berselera tawar menjadi serba pedas, asin, dan bersantan. Masih sedikit rumah makan yang menyediakan menu khas Sunda, misalnya Restoran Taman Sari. Khusus untuk masakan Jawa tentu dikenal dengan bakso dan sate (Madura). Namun ada pula rumah makan Jawa yang hanya diminati kalangan elit, *Wong Solo* misalnya. Yang menarik sekarang ini munculnya pedagang kaki lima bertenda yang menjajakan *pecel lele* di sore dan malam hari di pusat kota Padang, sekitar Jalan Ratulangi, Khatib Sulaeman, Agus Salim, dan A. Yani. Konsumennya malah lebih banyak orang Minang ketimbang orang Jawa sendiri. Tentu saja mereka yang datang ke tempat tersebut kebanyakan anak muda yang menyukai makanan alternatif dari kebiasaan makannya di rumah. Tidak diketahui dengan pasti apakah fenomena ini ada hubungannya dengan prestise tertentu atau rasa bosan mengingat kuatnya tradisi makan orang Minang. Akan tetapi, tentu ini tidak merepresentasikan perubahan makan generasi muda Minang.

Keberadaan kelompok etnis biasanya dikenal dari lambang-lambang yang dipakainya, seperti pakaian, dialek, bentuk rumah, warna pakaian, dan tingkah laku. Lambang-lambang tersebut merupakan "cap" (*hallmark*) suatu kelompok etnis yang diwariskan berketurunan (Pelly, 1989: 8).

Berdasarkan penelitian Evers di Kota Padang (2002) dalam dua rentang waktu 1969-1970 dan 1991 terjadi perubahan yang signifikan dalam tiga bidang, yaitu agama, perdagangan, dan negara. Simbol-simbol etnisitas makin menguat ditambah kuatnya dominasi negara yang ditandai dengan munculnya mesjid-mesjid baru, kompleks pertokoan, gedung-gedung bank, dan lain-lain. Urbanisasi di Padang yang terekspresikan dalam bangunan publik, fungsinya dikaburkan oleh masyarakat petani yang matrilineal.

Dalam konteks pergaulan masyarakat kota Padang, lambang-lambang yang menunjukkan keberadaan sejumlah etnis, seperti bentuk rumah mungkin tidak relevan dijadikan rujukan. Sebagian besar bangunan publik sudah memiliki citra Minangkabau dengan penggunaan atap bagongjong, antara lain kantor pemerintah, perkantoran swasta, bank, hotel, dan sekolah.



Pemandangan itu nampak, terutama di jalan-jalan utama, seperti Jalan Sudirman, Katip (Khatib Sulaeman), Bagindo Azis Chan, Alang Lawas, M. Yamin. Bahkan sebuah pusat perbelanjaan besar di Tabing Padang yang keberadaannya sempat menuai protes, karena dianggap menyingkirkan pedagang kecil, berhasil mengidentikkan dirinya dengan identitas "Minang". Pada permulaan tahun 2005 ini sedang dimulai pembangunan dua buah pusat perbelanjaan raksasa, tepat di pusat Kota Padang, bekas terminal lama Goan Hoat dan Lintas Andalas yang juga menuai kontroversi.

Belum lama ini (Sekitar bulan Mei-Juni 2005) Pemerintah Kota Padang berencana untuk mewajibkan berpakaian muslimah bagi siswi di lingkungan pendidikan. Kekhawatiran hilangnya identitas Minang (Islam) menjadi latar belakang rencana pemberlakuan perda itu. Padahal jika pada lingkungan pendidikan diberlakukan pakaian muslimah, seberapa kuat *ghirah* menutup aurat tersebut efektif pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga harus mempertimbangkan perbedaan penafsiran keagamaan yang majemuk di kalangan masyarakat.

Stereotip yang berkembang sekarang, umpamanya orang Minang "licik"; orang Sunda "tidak setia"; orang Batak "kasar"; orang Nias "penjudi"; orang Jawa "lemah"; orang Mandailing "pemburu tanah". Dalam interaksi sesama orang Minang sendiri, penulis pernah mendengar stereotip, misalnya: "Hati-hati dengan Pariaman"; "Jangan kawin dengan orang Padang!"; "Hati-hati dengan *magic* 3P! (Pariaman, Pesisir, Pasaman)". Stereotip biasanya didefinisikan sebagai generalisasi yang relatif tetap mengenai kelompok atau kelas manusia. Dalam praktik, definisi ini biasanya berpusat pada karakteristik negatif dan tidak menguntungkan, meski ada beberapa penulis yang memasukkan konsep stereotip yang positif. Stereotip ini akan semakin berkurang intensitasnya jika komunikasi antar etnis lebih dijalin atas dasar realitas dan bukannya mitos. Informasi yang lebih terang tentang etnis tertentu akan banyak membantu tumbuhnya pandangan yang lebih positif.

Sulit mendapatkan data yang cukup akurat berapa banyak kelompok etnik minoritas mengalami perlakuan diskriminatif. Dari beberapa informan yang penulis mintakan keterangannya, terdapat kecenderungan dari kelompok etnis minoritas (terutama Jawa) kembali ke daerahnya karena dua hal, yaitu menguatnya simbol-simbol identitas lokal dan kecenderungan politik birokrasi yang mengistimewakan putera daerah. Berdasarkan wawancara lapangan dengan beberapa informan muncul pendapat bahwa orang Minang



rantau umumnya lebih objektif dibanding orang Minang yang tidak pernah merantau, maksudnya keluar dari Sumatera Barat. Pendapat tersebut biasanya dikaitkan dengan wawasan pluralisme yang diambil di negeri orang atau bisa juga karena mereka yang berpendapat demikian menyamakan dengan pengalaman dirinya yang merantau.

Di lingkungan pendidikan tinggi terjadi "persaingan diam-diam" antara kelompok etnik Minang dan etnik lainnya. Persaingannya tentu tidak terletak pada jabatan-jabatan fungsional, melainkan pada level struktural. Pertanyaan kemudian adalah apakah kecenderungan ini ada hubungannya dengan kecenderungan rekrutmen para pejabat di Sumatera Barat untuk jabatan eselon II dan I, yang diambil dari orang-orang potensial di perguruan tinggi. Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan penjelasan yang lebih khusus.

Di bidang perniagaan secara umum tidak melibatkan dominasi etnis tertentu. Pasar lebih cenderung mempertimbangkan faktor kekuatan modal. Pendekatan budaya-kebahasaan tidak menjadi faktor utama kesuksesan sebuah negosiasi, karena kepercayaanlah menjadi penentunya. Namun pada tingkat interaksi dalam sebuah perusahaan, kadang-kadang kedekatan etnis masih dipandang cukup penting, guna melancarkan komunikasi dan muncul ganjalan karena adanya stereotip.

Adat dan agama di Minangkabau merupakan fondasi kehidupan orang Minang. Manan (1984: 4) menyebutkan adat sebagai "*the collective identity of the Minangkabau, the pillar of the sacred notion of the Minangkabau world*". Adat Minangkabau meski dalam pengaturan internalnya egaliter, namun dalam hubungan dengan sistem budaya lain tidak cukup tergambar secara lebih tegas.

Adat merupakan identitas kolektif orang Minang. Oleh karena itu, dengan proporsi penduduk yang mayoritas, adat Minangkabau menunjukkan superioritasnya terhadap kebudayaan minoritas. Penelitian Fitri Eriyenti (1989) menyebutkan dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Minangkabau menunjukkan superioritasnya dengan menganggap kebudayaan, agama, adat Minang lebih tinggi dari Nias. Pada tingkat filosofi, adat Minang menyediakan ruang-ruang yang demokratis dalam suasana internal budaya Minangkabau. "Alam takambang jadi guru" dan "dima langik dijunjuang, di sinan bumi dipijak" merupakan contoh dari



keberhasilan model komunikasi orang Minang di perantauan, disamping usaha menjalin kontak intensif dengan sesama perantau dan kampung halaman.

Persoalnya sekarang, menjadi orang Minang adalah sekaligus menjadi muslim. Keberislaman adalah ciri dari keminangkabauan. Hubungan antar etnis akan semakin mudah jika ada persamaan agama. Penelitian Syamsir (dalam Nasution, 2002) menyebutkan bahwa interaksi Minang dan Mandailing di Pasar Gadang mengandung konflik potensial yang dipicu oleh *prejudice*, perilaku diskriminatif, dan agama. Orang Mandailing yang Islam menghilangkan stereotip hingga interaksi berjalan dengan baik.

Pada tingkat ini, apa yang penulis amati selama 2-3 tahun terakhir, menunjukkan semakin kuatnya upaya revitalisasi agama dan budaya yang dibarengi menguatnya sentimen keagamaan. Beberapa ormas yang muncul dan tentu mendapat restu pemerintah setempat berusaha menjaga ranah Minang dari pengaruh kristenisasi dan modernisasi. Umpamanya, sebuah ormas melaporkan pihak manajemen rumah sakit swasta di kota Padang yang berada di bawah naungan Yayasan Katolik. Karyawan perempuannya yang memakai jilbab mengalami intimidasi dari oknum pihak rumah sakit. Sebagian kalangan langsung mengaitkan kejadian tersebut dengan usaha kristenisasi di ranah Minang. Akibat demonstrasi tersebut, manajemen rumah sakit mengadakan penertiban ulang terhadap pihak yang melakukan intimidasi tersebut. Kasus lain, misalnya demo terhadap perusahaan penyelia air minum milik pengusaha Cina di Kota Padang. Isu yang berkembang, proses penyulingan airnya tidak halal. Menanggapi isu tersebut, pemilik perusahaan membuat klarifikasi satu halaman penuh di sebuah surat kabar lokal. Dari beberapa pandangan masalah ini terungkap pada peristiwa yang terjadi, lebih karena persaingan bisnis semata-mata.

Sebagaimana diungkap pada bagian pendahuluan, isu-isu PAD (Putra Asli Daerah) menjadi wacana yang muncul dalam kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Isu-isu utama yang diusung para kandidat, diantaranya pelestarian adat Minangkabau, merevitalisasikan nilai-nilai ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Melalui slogan kampanye dapat diketahui orientasi dari visi masing-masing calon. Slogan kampanye Pilkada Sumbar, antara lain Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid: *Mambangkik Batang Tarandam, Basamo Mambangun Nagari*; Gamawan Fauzi-Marlis Rahman: *Memberi Keteladanan, Jujur dalam pengabdian*; Kapitra Ampera-Dalimi Abdullah: *Pelayan Bagi Semua Negeri*; Jeffrie



Geovanie-Dasman Lanin: *Berbakti untuk Nagari*; Leonardi Harmainy-Rusdi Lubis: *Bersatu untuk Maju*. Slogan-slogan tersebut dimuat bersama kandidat dan pasangannya dengan latar mesjid (atau surau) dan rumah gadang pada poster, spanduk, leaflet, dan baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis. Agaknya isu-isu lokal masih mendapat tempat yang utama. Karena jumlah pemilih kelompok etnik non Minang tidak signifikan, isu-isu yang menyangkut hubungan antar etnis dan terbukanya ruang-ruang bagi kemudahan kepemilikan tanah, tidak mendapat perhatian.

Penutup

Tesis Colombijn sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan kiranya masih relevan. Ada ruang-ruang yang tetap, namun ada juga yang berubah. Ruang-ruang yang tidak mengalami perubahan, misalnya konsep "kosmos" kota Minangkabau, dominasi kekuasaan, dan keberagaman. Sementara itu, ruang-ruang yang berubah, antara lain interaksi dalam dunia perniagaan.

Jalan menuju kota Padang sebagai kota multikultur masih cukup terjal. Hambatan budaya dalam tafsir kekuasaan masih cukup kuat, terutama merintis jalan ke arah "kota cagar budaya dan agama". Menjadikan Padang kota tercinta untuk semua etnik agaknya masih memerlukan proses yang panjang. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya yang intensif dan meminjam istilah Parsudi Suparlan perlu pendefinisian kembali konsep nasional dan umum. Ada wilayah-wilayah nasional dan umum yang dibedakan dari wilayah-wilayah etnis tersebut.

Daftar Pustaka

Colombijn, Freek

1994 Patches of Padang: The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space. Leiden: Research School CNWS Leiden University.

Colombijn, Freek

1994 Paco-paco (Kota Padang): Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad Kedua Puluh dan Penggunaan Ruang Kota, Terjemahan Tim BWSB. Padang: Dinas Parsenibud Kota Padang dan BWSB.

Effendi, Nursyirwan

1993 Migrasi Internal dan Perkembangan Kota-kota di Indonesia: Kasus Kota Padang. Depok: Pusat Antar Univ. Ilmu-ilmu Sosial UI.



- Eriyanti, Fitri
 1989 "Suatu Tinjauan tentang Pembauran Masyarakat Nias dengan Masyarakat Minangkabau di Desa Pasar Usang". Skripsi. Padang: IKIP Padang.
- Evers, Hans-Dieter dan Rudiger Korff
 2002 Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial. Terjemahan Zulfahmi. Jakarta: LP3ES.
- Imadudin, Iim
 2002. "Nagari Dialahkan Garuda: Pengalaman Pelaku Sejarah dalam Kemelut PRRI 1958 hingga 1978". *Laporan Penelitian*. Padang: BKSNT Padang.
- "Ketika Perantau Berebut Kursi Gubernur", *Tempo*, 27 Maret 2005
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper
 2000 Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial. Buku Dua. Machiavelli – World System. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Imran
 1984 A Traditional Elite in Continuity and change the Chiefs of the Matrilineal Lineages of the Minangkabau of West Sumatra, Indonesia. Thesis. Urbana Illinois: University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Sri Ilham Nasution
 2002 "Pola Adaptasi dalam Hubungan Antar Etnik: Studi Deskriptif pada kelompok Etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang", Tesis, PPs Universitas Negeri Padang.
- Prayitno, Irwan
 2005 Kiprah Seorang Asli Putra Minang. Jakarta: tp.
- Suparlan, Parsudi
 2001 "Indonesia Baru dalam Perspektif Multikulturalisme", *Media Indonesia Edisi Khusus*, 10 Desember
- Tim Peneliti IRE Wilayah Sumbar
 2004 "Integrasi Sosial Budaya Masyarakat Etnik Minang dan Etnik Nias di Kec. Padang Selatan". Laporan Penelitian. Padang: Institut for Research and Empowerment Yogyakarta.
- Zed, Mestika dkk.
 1998 Sumatera Barat di Panggung Sejarah. Jakarta: Sinar Harapan.



